

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan secara historis maupun filosofis telah ikut mewarnai dan menjadikan sebagai landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta memungkinkan warganya mengembangkan dirinya dari segala aspek, baik aspek jasmani maupun aspek rohani. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dinyatakan pada pasal 3 yaitu :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka semua program pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan direncanakan untuk mencapai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, salah satunya dengan adanya perubahan kurikulum. Adapun bentuk kurikulum yang dikembangkan dan diberlakukan di Indonesia tidak ada yang dibakukan secara permanen. Perubahan suatu kurikulum merupakan akibat adanya perubahan paradigma yang dapat disebabkan antara lain kebijakan pemerintah, berkembangnya nilai-nilai sosial, budaya dan politik serta berubahnya nilai-nilai kesejajaran dalam pergaulan

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu maka perubahan kurikulum merupakan suatu keharusan. Ini juga akan membuktikan bahwa kurikulum membutuhkan paradigma baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Atas dasar perubahan kurikulum itu, maka kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975, 1984, 1994 dan 2004) yang disusun secara nasional dan menghasilkan satu kurikulum untuk semua sekolah, diganti dengan kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan, sedangkan pemerintah pusat hanya menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dikenal dengan KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan KTSP memiliki kewenangan baik dalam merencanakan, pelaksanaan maupun penilaian terhadap hasil belajar mengajar. Dalam merencanakan kurikulum ini merupakan suatu hal yang sangat penting diantaranya satuan pendidikan diharapkan memperhatikan tujuan atau perubahan apa yang akan diharapkan tercapai.

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa/peserta didik kearah perubahan tingka laku yang diinginkan dan menilai sampai dimana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa, adapun model perencanaan kurikulum merupakan “rancangan, pola atau model”, (Rusman:22). Untuk itu, perencanaan atau mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum yang sesuai dengan misi dan visi sekolah. Seseorang atau sekelompok orang yang menyusun rancangan atau model kurikulum bisa disebut desainer kurikulum. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum sama dengan tugas seorang arsitek. Sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksi suatu bangunan terlebih dahulu seorang arsitek harus

merancang model bangunan yang akan dibangun. Begitu juga dengan desainer kurikulum dalam hal ini kepala sekolah, guru harus dapat menentukan bagaimana persiapan, pelaksanaan maupun evaluasinya sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Dalam merancang model KTSP maka salah satu acuan operasionalnya adalah peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia. Pada Madrasah Tsanawiyah untuk memenuhi acuan operasional ini dimuatlah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari mata pelajaran Fiqh, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam dan Al-qur'an Hadits. Adapun fungsi daripada Pendidikan Agama Islam adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kaitan antara tujuan pendidikan nasional dengan pendidikan agama ialah pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 diantaranya menyebutkan bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama".

Secara lebih khusus, Pusat Kurikulum Balitbang, Diknas (2001:1) menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah :

"Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab Al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan serta penggunaan pengalaman".

Salah satu jenis Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut :

“Menyampaikan ilmu pengetahuan tentang cara-cara membaca dan menulis ayat Al-Qur'an maupun Matan Hadits serta memahami isinya, membekali peserta didik nilai-nilai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran islam siswa sehari-hari, juga untuk menangkal pengaruh pergaulan bebas di luar sekolah terhadap peserta didik di dalam sekolah”. (Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama, 2003:2)

Sejalan dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Agama Islam di atas, kesemuanya itu kembali kepada bagaimana program pembelajaran dan kinerja guru mengimplementasikannya di kelas. Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak akan berarti (menjadi kenyataan) jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara aktual di satuan pendidikan dan di kelas. Dalam implementasi ini, tentu saja harus diupayakan penanganan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan masyarakat.

Dari berbagai dimensi implementasi kurikulum yang terpenting untuk dicermati, menurut Hamalik (2007:190), adalah “materi kurikulum, struktur organisasi kurikulum, peranan atau perilaku, pengetahuan, dan internalisasi nilai”. Keberhasilan implementasi terutama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasinya. Pada prinsipnya implementasi ini mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, tujuan, *subject matter*, strategi mengajar dan kegiatan belajar, serta evaluasi dan *feedback*.

Dalam penelitian ini juga tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan studi tentang pengembangan KTSP pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, seperti Towaf tahun 1996 (Purwana,

2006:106) mengungkapkan adanya kelemahan, yaitu pendekatan masih cenderung normatif yang tidak diikuti konteks sosial budaya sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama dalam kehidupan kesehariannya. Juga penelitian Nurdin (1992:102-108) tentang “prilaku mengajar guru PAI lulusan program S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang”. Ia menemukan antara lain : 1), Sebagian guru PAI tidak memiliki persiapan mengajar yang optimal; 2) kebanyakan guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab ; 3) penilaian hanya terbatas pada ranah kognitif dan ranah psikomotorik tingkat rendah, sedangkan ranah afektif cenderung diabaikan ; 4) penguasaan guru terhadap materi PAI sangat tergantung kepada peranannya di masyarakat.

Penelitian Balyai (1999:100) tentang “proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di SMA Banjarmasin” ia menemukan guru-guru PAI tidak memperlihatkan adanya perbedaan langkah-langkah mengajar untuk topik yang berbeda seperti tauhid, ibadah, syariah, akhlak, tarikh, dan membaca Al-Qur’an. Padahal setiap topik atau pokok bahasan kerap kali menuntut metode pendekatan yang sesuai. Sejalan dengan itu juga yang direkam oleh penelitian Sayuti (2002:142) di SMA 4 Bandung mengenai hasil evaluasi terhadap implementasi kurikulum PAI ini menunjukkan bahwa penilaian ranah afektif atau sikap dan keterampilan (psikomotor) cenderung diabaikan. Padahal guru kontekstual menurut Sukmadinata (2004:186) adalah seharusnya melakukan evaluasi yang komprehensif, yaitu yang mencakup evaluasi proses, misalnya ketika siswa berdiskusi, mengerjakan tugas, dan penyelesaian soal. Hal inilah yang dimaksud evaluasi otentik, yaitu apa yang secara nyata dilakukan dan dihasilkan siswa.

Berbeda dengan hasil penelitian Arifin (2006:107-117) tentang evaluasi bahwa konsep guru tentang evaluasi masih berpusat pada pemberian nilai. Belum

memotivasi siswa, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan kriteria tertentu. Materi tes hanya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa (kognitif). Dan kegunaan data evaluasi masih terbatas untuk guru. Dalam evaluasi formatif, guru cenderung tidak menyusun kisi-kisi, tetapi langsung menggunakan satuan pelajaran.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas bahwa ini menunjukkan bahwa betapa penting peranan guru baik dalam, perencanaan, implementasi dan evaluasi KTSP. Pada saat perencanaan kurikulum guru diharapkan dapat memperhatikan segala segi/aspek kurikulum. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan KTSP, Sanjaya (2008;149) *pertama* analisis konteks yang meliputi 1) mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai sumber dan acuan penyusunan KTSP ; 2) menganalisis kondisi yang ada dari satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya dan program-program ; 3) menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. *Kedua* mekanisme penyusunan tim penyusun pada tingkat MTs, terdiri dari guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Didalam penyusunan KTSP ini melibatkan komite madrasah, dan nara sumber, serta pihak-pihak lain yang terkait. *Ketiga* kegiatan, pada tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. *Keempat* Pemberlakuan, dokumen KTSP pada MTs dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh Departemen/Dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Adapun kaitannya dengan beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan belum terakomodir terhadap keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan KTSP. Seperti yang diungkapkan Towaf tahun 1996 (Purwana, 2006:106) kurang menghayati nilai-nilai agama dalam kehidupan kesehariannya. Juga penelitian Nurdin (1992:102-108) Ia menemukan diantaranya sebagian guru PAI tidak memiliki persiapan mengajar yang optimal dan sebagainya.

Pada tahap implementasi KTSP guru merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kurikulum. Untuk itu, Sanjaya (2008:28) mengungkapkan ; “bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif ”. Adapun kaitannya dengan hasil penelitian yang diungkapkan penelitian Balyai (1999:100) tentang “proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di SMA Banjarmasin” ia menemukan guru-guru PAI tidak memperlihatkan adanya perbedaan langkah-langkah mengajar untuk topik yang berbeda seperti tauhid, ibadah, syariah, akhlak, tarikh, dan membaca Al-Qur’an. Padahal setiap topik atau pokok bahasan kerap kali menuntut metode pendekatan yang sesuai.

Evaluasi diungkapkan bahwa masih sangat jauh dari kriteria KTSP sendiri, seperti diungkapkan pada penelitian Arifin (2006:107-117) bahwa mengenai hasil evaluasi terhadap implementasi kurikulum PAI ini menunjukkan bahwa penilaian ranah afektif atau sikap dan keterampilan (psikomotor) cenderung diabaikan. Dan juga bahwa konsep guru tentang evaluasi masih berpusat pada pemberian nilai.

Belum memotivasi siswa, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan kriteria tertentu.

Untuk itu, maka dalam penelitian ini mencoba mengangkat masalah Studi tentang pengembangan KTSP pada mata pelajaran Al-qur'an Hadits pada MTsN 1 dan 2 di Kota Bandung. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1, jalan Terus Holis Margahayu Utara Telp (022) 5406394 Bandung dan MTsN 2 Kota Bandung Jalan Antapani Nomor 78 telp/fax (022) 7277895 Bandung 40291. Dengan harapan akan mendapatkan gambaran bagaimana pengembangan KTSP khususnya pada mata pelajaran al-qur'an hadits pada kurikulum kelas VII di MTsN 1 dan 2 di Kota Bandung.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Semua pengalaman belajar siswa baik diperoleh dari dalam maupun luar lembaga pendidikan yang direncanakan secara sistematis dan terpadu merupakan bentuk tujuan dalam rangka mempersiapkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pengembangan KTSP yang memiliki peran yang sangat penting, seperti kebijakan pemerintah, kebijakan kepala sekolah/madrasah, guru-guru dan lingkungan sekolah/madrasah. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

36 ayat 1 “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kebijakan kepala sekolah/madrasah dalam rangka mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat memberikan pengaruh yang sangat penting. Kurikulum merupakan jantungnya lembaga pendidikan, oleh karena itu kepala sekolah/madrasah harus betul-betul menguasainya. Untuk itu, kepala sekolah dalam upaya mewujudkan kinerjanya dalam bidang ini harus mampu, (1) memfasilitasi sekolah untuk membentuk dan memberdayakan tim pengembangan kurikulum. (2) memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah agar mampu menyediakan dokumen-dokumen kurikulum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. (3) memfasilitasi guru-guru mengembangkan standar kompetensi setiap mata pelajaran yang diampunya. (4) memfasilitasi guru-guru mengembangkan silabus dan RPP. (5) memfasilitasi guru memilih sumber dan bahan ajar. (6) memfasilitasi guru-guru memilih media dan alat pembelajaran yang sesuai untuk materi yang diajarkan... (Rusman (2009:12).

Kurikulum memiliki dua sisi yang sangat penting, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen

kurikulum berfungsi sebagai pedoman guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk pembelajaran. Jadi dengan demikian kurikulum sebagai sebuah dokumen dengan proses pembelajaran sebagai implementasi dokumen tersebut merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum, bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif. Peranan guru-guru dalam mengembangkan kurikulum memegang peranan yang sangat penting baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian kurikulum. Oleh sebab itu, guru disebut sebagai perencana, pelaksana dan pengembangan kurikulum dikelasnya, Sukmadinata (2002:157). Guru adalah penterjemah kurikulum oleh sebab itu dialah yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat/daerah untuk disajikan dikelasnya.

Lingkungan sekolah/madrasah merupakan lingkungan tempat pelaksanaan pembelajaran. Lingkungan ini bisa datang dari orang tua siswa atau masyarakat yang ada dilingkungan persekolahan. Faktor orang tua siswa dalam pengembangan kurikulum dapat dilihat dari dua hal; *pertama* dalam penyusunan kurikulum dan *kedua* dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum orang tua siswa akan diwakili oleh beberapa orang sebagai perwakilan terutama yang memiliki cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Adapun dalam pelaksanaan kurikulum peran orang tua lebih besar, dalam pelaksanaan diperlukan kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa sebab sebagian kegiatan belajar murid dituntut oleh kurikulum adalah dilaksanakan di rumah, untuk itu sewajarnya

orang tua mengikuti dan mengamati kegiatan anak-anaknya belajar di rumah. Adapun faktor masyarakat umum merupakan sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat disekitarnya.

Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas. Sukmadinata (2000:1) pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru (*curriculum construction*), bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada (*curriculum improvement*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada satu sisi pengembangan kurikulum berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan (*macro curriculum*). Pada sisi lainnya berkenaan dengan penjabaran kurikulum (GBPP) yang telah disusun oleh tim pusat menjadi rencana dan persiapan-persiapan mengajar yang lebih khusus, yang dikerjakan oleh guru-guru di sekolah/madrasah seperti penyusunan rencana tahunan, caturwulan, satuan pelajaran dan lain-lain (*micro curriculum*).

Dalam penelitian ini, akan mengangkat bagaimana dokumen KTSP yang terdiri dari dokumen satu dan dokumen dua. Dokumen satu akan meliputi tentang acuan pengembangan KTSP memuat latar belakang, tujuan dan prinsip pengembangan, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan. Untuk dokumen dua KTSP meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Dari hasil pengembangan KTSP pada satuan pendidikan diharapkan akan memberikan dampak yang positif, baik kepada satuan pendidikan, guru-guru maupun kemajuan dan perubahan tingka laku yang terjadi kepada peserta didik. Untuk lebih jelasnya berikut bagan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pengembangan KTSP.



Bagan 1 : Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengembangan KTSP

Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimanapun bagus suatu perencanaan penyusunan KTSP tanpa diimbangi dengan pelaksanaan yang bagus maka akan mendapatkan suatu hasil yang tidak akan memuaskan, dan sebaliknya jika pelaksanaan pembelajaran yang tidak berpedoman kepada hasil perencanaan KTSP maka pelaksanaan pembelajaran tidak akan efektif dan efisien. Oleh karena itu maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Studi tentang Pengembangan KTSP Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits”. (Penelitian Kualitatif pada MTsN I dan 2 di Kota Bandung).

Dari rumusan masalah tersebut, maka secara rincin masalah penelitian dibatasi pada :

1. Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen satu dan dua) pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung.
2. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 Kota Bandung.
3. Kegiatan Penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung.

C. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen satu dan dua) pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung?.
2. Bagaimana Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung ?.

3. Bagaimana Kegiatan Penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung ?.
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung?.

D. Tujuan Penelitian.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan penilaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Al-Qur'an Hadist kelas VII pada MTs Negeri I dan 2 di Kota Bandung. Dan selanjutnya dapat dijadikan bahan masukan, arahan bagi pihak-pihak terkait dalam memperbaiki sistem Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perencanaan KTSP (dokumen satu dan dua) pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung.
2. Pelaksanaan KTSP pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung.
3. Kegiatan Penilaian KTSP pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri I dan 2 di Kota Bandung

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi terhadap studi tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Al-Qur'an Hadits pada kelas VII di MTs Negeri 1 dan 2 Kota Bandung diharapkan dapat memberikan manfaat/sumbangan kepada :

1. Para peneliti lanjutan yang menggunakan pendekatan teoretisasi data dalam mengembangkan teori dasar pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum diharapkan memenuhi keinginan dan harapan bagi pengguna kurikulum, untuk itu kebermaknaan, kesesuaian antara teori dan praktek dilapangan dapat dijadikan bahan penyempurnaan kurikulum. Data penelitian ini dikumpulkan sesuai dengan apa adanya tanpa dimanipulasi dan tidak ada interpretasi peneliti sehingga responden dapat mengungkapkan data apa adanya, menyeluruh dan mendalam dengan penuh makna.
2. Kepala sekolah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan pembinaan tim pengembangan kurikulum, guru-guru, terutama yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadits pada kelas VII.
3. Tim pengembangan KTSP pada tingkat satuan pendidikan baik dalam rangka melakukan perbaikan atau penyempurnaan dokumen kurikulum maupun dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan pola program pembelajaran pada satuan pendidikan.
4. Untuk peneliti sendiri, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman-pengalaman baru dan kesadaran akan adanya perbedaan pengetahuan teoritik dengan kenyataan dilapangan dari hasil-hasil penelitian mengenai studi tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.